



Media: Harian Jogja

Hari: Senin

Tanggal: 14 Januari 2019

Halaman: 13

MASALAH PERKOTAAN

Tahun Ini Jogja Ditarget Bebas Kumuh

JOGJA—Jogja ditarget bebas kawasan kumuh tahun ini. Hingga kini di wilayah Jogja masih tersisa sekitar 50,97 hektare kawasan kumuh.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Jogja Tri Agus Haryono mengaku telah menyiapkan sejumlah program untuk mencapai target nol kawasan kumuh di Jogja. Dia optimistis target tersebut bisa diwujudkan tahun ini.

"Kami sudah siapkan kegiatan-kegiatan untuk menata kawasan kumuh sesuai dengan kebutuhan masing-masing wilayah," katanya, Sabtu (12/1).

Dia menyebutkan sejumlah wilayah yang menjadi sasaran penanganan kawasan kumuh selama 2019. Di antaranya kawasan yang berada di bantaran Sungai Gajah Wong, seperti Muja-Muja dan Giwangan.

Kawasan lain yang jadi sasaran program, ada di Pringgokusuman, Ngampilan dan Pakuncen. Ketiganya berada di wilayah bantaran Sungai Winongo. "Untuk kawasan di sekitar Sungai Code, yang kami sasar di wilayah Klitren dan Purwokinanti," katanya.

● Lebih Lengkap Halaman 16

Sumber: Bantak, SK Wali Kota Jogja No.216/2016

SAATNYA JOGJA BEBAS KUMUH

Kawasan Kumuh di Jogja

- 1 Kawasan kumuh rendah: 20 hektare
- 2 Kawasan kumuh sedang: 216 hektare
- 3 Kawasan kumuh tinggi: 27 hektare

Total luas: **264,9 hektare**

Penanganan Kawasan Kumuh (2017-2019)

- 2017: 79 hektare.
- 2018: 40,82 hektare.
- 2019: 50,97 hektare.*

*Target

Tahun Ini...

Menurut Agus, tidak semua sasaran program penanganan kawasan kumuh dimulai sejak awal. Sebab di beberapa kelurahan hanya meneruskan program yang sudah berjalan tahun sebelumnya. Misalnya di Muja-Muja, pihaknya hanya melanjutkan program penataan bantaran sungai yang belum selesai. "Penanganan kawasan kumuh ini dibiayai dengan APBD Jogja, dana dari Pemd DIY dan juga Pusat," kata Agus.

Salah satu program penanganan kawasan kumuh skala kawasan menggunakan dana APBN sehingga diharapkan dapat mempercepat penanganan kawasan kumuh di Kota Jogja. "Besaran alokasi dana yang akan dikucurkan masih dibahas, tetapi bisa mencapai puluhan miliar rupiah," kata Kepala Seksi Pengawasan Bangunan DPUPKP Kota Jogja, Yunita Rahimi Hapsari.

Berdasarkan SK Wali Kota Jogja No.216/2016 tentang Kawasan Kumuh, luas kawasan kumuh di Kota Jogja mencapai 264,9 hektare. Luas kawasan kumuh tersebut

kumuh yang akan dilakukan adalah Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) yang menyasar 15 kelurahan, namun dimungkinkan masih bisa dilakukan penambahan lokasi sasaran. "Jumlah kelurahan sasaran yang akan memperoleh bantuan dana investasi (BDI) pada tahun ini dimungkinkan berkurang karena kawasan kumuh di beberapa kelurahan sudah bisa ditangani," katanya.

Selain itu, pada tahun ini juga akan dilaksanakan penataan permukiman berkurang setelah pada 2017, Pemkot melakukan penanganan seluas 79 hektare dari target awal 40 hektar. Pada 2018 kawasan kumuh yang ditangani mencapai 40,82 hektare. Tahun ini, kata dia, ditargetkan tidak ada lagi kawasan kumuh di Jogja. "Kecamatan dengan sisa kawasan kumuh paling luas yang harus ditangani berada di Jetis, yaitu mencapai 9,94 hektare. Sebelumnya kawasan kumuh terluas ada di Umbulharjo sekarang tinggal 8,78 hektare saja," katanya. (Abdul Hamid/Ranak)

Tindak Lanjut

Untuk Ditanggapi

Untuk Diketahui

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas PUPKP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 06 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005